



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja merupakan acuan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD dan RENSTRA. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci Mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKP 2025 dan RKPD 2025 yang berisi rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya.

Akhirnya kami berharap kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadikan dokumen ini sebagai Rencana didalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun 2025, dan semoga memberikan manfaat.

Palu, September 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35

BAB III

TUJUAN, SASARAN.....	43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	45
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	47

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.....	49
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	49

BAB V

PENUTUP.....	53
5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.....	53
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	54
5.3 Rencana tindak lanjut.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dimana gambaran Upaya Pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian target yang akan direncanakan.

Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan nasional maupun daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2025 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pemenuhan maksud tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mengacu pada Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
19. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126):

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulawesi Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

□ Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dimaksudkan untuk merumuskan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD, sehingga lebih memantapkan Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,serta memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik Pemerintah, maupun masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana secara berkesinambungan. Diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

□ Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Renja menjadi acuan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Renja sebagai dokumen yang merumuskan Program-program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi

Tengah untuk tahun 2025, mengacu pada Renstra P2KB 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN,

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi sebagai sebagai salah satu metode yang berfungsi untuk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui apakah kinerja utama dari Perangkat Daerah telah tercapai, termasuk didalamnya meliputi program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dan 2024, berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yakni untuk mengetahui:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi/ memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian

Renstra.

1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

2. Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:
3. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 didukung oleh pendanaan yang digunakan secara efektif dan efisien. Adapun Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung dicapai tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.013.633.462 dari jumlah pagu total Rp. 16.993.446.854 dengan tingkat capaian 94.23% dari Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung.
4. Alokasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan DPPA-SKPD adalah sebesar 16.993.446.854 terdiri dari:
 - a) Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 6.682.422.422.397,67
 - b) Belanja Langsung Rp. 10.311.024.456.00
5. Rincian realisasi belanja 2024 diuraikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.993.446.854.67	16.013.633.462	94,23%
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.044.650	27.044.650	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.044.650	27.044.650	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	982.760.000	980.135.499	99,73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.682.422.398.67	5.765.292.333	86,28
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	930.700.000	928.075.499	99,72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.060.000	52.060.000	100

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.520.530	255.201.000	99,87
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	255.520.530	255.201.000	99,87
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.731.291.288	3.726.318.260	99,87
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	522.861.088	522.726.750	99,97
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	412.526.750	412.525.750	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.795.903.450	2.791.065.760	99,83
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.571.012	283.454.300	99,96
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	283.571.012	283.454.300	99,96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.888.966	539.705.716	99,97
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	539.888.966	539.705.716	99,97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.448.409.772	1.429.835.093	98,72
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.550.000	317.484.031	99,98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.240.000	46.240.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.084.619.772	1.066.111.062	98,29
2	Program Pengendalian Penduduk	828.426.950	821.057.435	99,11
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	423.763.800	422.365.965	99,67
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	303.153.800	303.012.965	99,95

	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	120.610.000	119.352.000	98,96
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	404.663.150	398.692.470	98,52
	Pemetaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)	321.489.150	315.518.470	98,52
	Penyusunan profil Program kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	83.174.000	83.174.000	100
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	913.262.506	910.838.250	99,73
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	278.383.054	277.092.854	99,54
	Pengembangan Strategi Operasional promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi sesuai kearifan budaya lokal	97.606.704	97.318.554	99,70
	Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dan pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program Bangga Kencana	151.637.350	150.635.300	99,34
	Pengembangan Media Massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi promosi dan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	29.139.000	29.139.000	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	634.879.452	633.745.396	99,82
	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	634.879.452	633.745.396	99,82

4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	1.300.848.782	1.274.750.926	97,99
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	487.918.900	484.287.400	99,26
	Penyediaan Kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuh 1000 hari pertama kelahiran (HPK)	71.245.900	70.037.200	98,30
	Pengembangan dan perbanyakan materi substansi pusat informasi konseling remaja (PIK R) media promosi, alat permainan edukatif Remaja dan sarana prasarana lainya yang dibutuhkan	32.000.000	32.000.000	100
	Sosialisasi dan pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	208.189.700	202.552.614	97,29
	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana pusat informasi konseling Remaja PIK R	195.513.550	190.736.002	97,56
	Advokasi Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota	48.280.200	44.538.435	92,25
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	257.700.532	250.599.275	97,24
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	257.700.532	250.599.275	97,24
	TOTAL ANGGARAN	16.993.446.854,67	16.013.633.462	94,23%

Tabel. 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERITAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIAT AN (SUB OUTPUT)	TARGET KINERJA		ANGGARAN APBD PERUBAHAN 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 2023 PERSENTASE CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD 2023
		K		RP	K	RP	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				18.720.642.625		17.693.374.511	94,51%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	%	7.582.121.863			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	%	29.965.650	100%	29.965.650	99.30%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokum en	1.916.900	1 Doku men	1.916.900	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dokum en	14.999.850	1 Doku men	14.999.850	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	2	Dokum en	3.000.000	2 Doku men	3.000.000	100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	10.048.900	1 Laporan	10.048.900	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	100	%	7.799.843.139	100%	6.862.574.798	87.98%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	95	Orang	6.835.293.139	95	5.934.568.798	86.82%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	Dokumen	919.550.000	2 Dokumen	883.006.000	96.03%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	%	337.639.100	100 %	337.429.600	99.94%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	229.586.100	2 Paket	229.469.600	99.98%
Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	Dokumen	53.035.000	1 Dokumen	52.960.000	99.89%
Bimbingan Teknis Implementasi pengaturan Perundang-undangan.	Jumlah org yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	4	Orang	55.000.000	4 Orang	55.000.000	100%

	pengaturan Perundang-undangan.						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100	%	3.685.619.608	100%	3.683.909.147	99.95%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	670.814.594	1 Paket	670.536.900	99.96%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistic kantor yang di sediakan	3	paket	1.117.962.564	3 Paket	1.116.730.000	99.89%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	2	Paket	78.646.600	2 Paket	78.646.600	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	laporan	1.818.195.850	13 Lapora n	1.817.995.647	99.99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.522.700.000	100%	1.511.499.000	99.26%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara	3	unit	1.522.700.000	3 Unit	1.060.799.000	69.67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	645.575.505	100%	645.557.512	99.53%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	470.005.500	1 Laporan	466.994.512	99.39%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	1	Laporan	175.570.005	1 Laporan	175.563.000	100%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Kab/Kota yang menyusun GDPK	1	Kab/Kota	1.195.602.550	1 Kab/Kota	1.177.076.788	98.45%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2	Dok	562.811.800	2 Dokumen	552.272.524	98.13%
Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	Laporan	345.517.600	1 Laporan	342.708.494	99.19%
Advokasi dan Sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK dan sector lain.	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pembentukan Rumah data kependudukan di kampung Kb .	1	dokumen	217.294.200	1 Dokumen	209.564.030	96.44%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	3	Dok	632.790.750	3 Dok	624.804.264	98.74%
Pemetaan program kependudukan, Keluarga	Jumlah dokumen hasil Pemetaan program kependudukan, Keluarga Berencana	1	dokumen	238.000.000	1 Dokumen	232.034.454	97.49%

Berencana dan Pembangunan Keluarga	dan Pembangunan Keluarga						
Penyusunan Profil kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Profil kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	dokumen	229.051.250	1 dokumen	297.030.310	99.32
Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1	Dokumen	95.739.500	1 dokumen	95.739.500	100%
▪ PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	100	%	1.029.056.300	100%	1.019.633.600	99.08%
▪ Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio Akseptor KB	4	Dokumen	541.266.900	4 Dokumen	537.910.200	99.38%
▪ Penggunaan Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE	Jumlah laporan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE	77	laporan	115.281.850	77 Laporan	115.103.550	99.85%
▪ Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	14	Dokumen	137.849.150	14 Dokumen	134.670.750	97.69%

▪ Pengembangan strategi Operasional promosi dan konseling kesehatan Reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	Jumlah dokumen hasil pengembangan strategi Operasional promosi dan konseling kesehatan Reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal	14	dokumen	158.297.700	14 Dokumen	158.297.700	100%
▪ Pembinaan promosi dan konseling kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen/ laporan	14	Laporan	129.838.200	14 Dokumen	129.838.200	100%
▪ Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Angka Pemakaian Kontrasepsi / mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49(Persen)	100	%	487.789.400	100%	481.723.400	98.76%
▪ Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77	Dokumen	299.519.750	77 Dokumen	297.326.710	99.27%
▪ Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77	Organisasi	188.269.650	77 Organisasi	184.396.690	97.94%
▪ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100	%	2.078.568.800	100%	2.033.041.207	97.81%
▪ Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Jumlah organisasi/ Dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan	100	%	1.592.996.400	100%	1.563.284.275	98.13%

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
▪ Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen	175.796.000	1 Dokumen	160.597.025	91.35%
▪ Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	13	Dokumen	211.744.850	13 Dokumen	744.850.000	100%
▪ Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	500	Orang/kelompok	279.086.000	500 orang	274.386.000	98.32%
▪ Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1	Laporan	156.765.900	1 Laporan	156.365.900	99.74%
▪ Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Inforamsi dan Konseling Remaja (PIK/ R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	50	Organisasi	48.512.350	50 Organisasi	48.512.350	100%
▪ Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	Dokumen	41.190.000	1 Dokumen	41.190.000	100%
▪ Sub. Kegiatan Advokasi, , Sosialisasi, dan Promosi IPK	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, , Sosialisasi, dan Promosi IPK	13	Laporan	545.370.050	13 Laporan	51.920.050	93.77%

▪ Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	jumlah kelompok masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan, bimbingan 1000 HPK	13	Dokumen	48.539.950	13 Dokumen	44.839.950	92.38%
▪ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	unit	448.547.000	1 Unit	448.283.850	99.94%
▪ Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100	%	485.572.400	100%	469.756.932	96.74%
▪ Sub. Kegiatan Pengelola Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PKKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	Dokumen	88.520.200	1 Dokumen	88.520.200	100%
▪ Sub. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	laporan	81.868.100	1 Laporan	77.628.100	94.82%
▪ Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1	Laporan	47.201.000	1 Laporan	44.425.532	94.12%
▪ Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	1	Dokumen	240.682.350	1 Dokumen	231.882.350	96.34%

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						
▪ Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1	Dokumen	27.300.750	1 Dokumen	27.300.750	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut: Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024).

TABEL. 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 – 2024

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA IKU/IKD	TARGET RENSTRA						CAPAIAN KINERJA					Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Ketentraman, Kebahagiaan dan Kemandirian Keluarga	Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Keluarga	52,47	54,38	52,50	63	61,9	62,5	51,49	51,09	59,99	61,2		Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga	Angka Fertilitas Rate (Total Fertility Rate/ TFR)	2,61	2,60	2,55	2,14	2,23	2,20	2,43	2,32	2,16	2,31		Melampaui Target

3	Meningkatnya Angka Prevalensi Contrasepsi Modern (mCPR)	Angka Pemakaian Kontrasepsi modern/ mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun	78,06	78,09	60	61	59,9	60,9	53,83	59,91	67,8	67,72		Melampaui Target
4	Menurunnya Cakupan PUS yang ingin Ber KB tapi tidak terpenuhi	Presentase Kebutuhan Ber -KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,66	14,63	13,98	13,98	13,35	12,90	11,96	6,57	14,6	9,8		Tercapai
5	Meningkatnya Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Presentase Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	13,00	13,35	19	23,6	35	35,5	20,1	13,02	21	17,24		Melampaui Target
7	Menurunnya angka Kelahiran Remaja Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Spesifik Fertility Rate /ASFR)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Spesifik Fertility Rate /ASFR)	51/1000	50/1000	34/1000	36/1000	32,65/1000	31,80/1000	48/1000	36/1000	33,25/1000	38/1000		Melampaui Target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana serta pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana serta tidak terciptanya koordinasi, dan sinkronisasi yang baik akan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah ditahun pertama setelah pembentukannya melalui PP No. 18 Tahun 2016 melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan didukung sumber daya manusia yang kuat dan kapasitas asset/modal yang memadai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Penetapan Rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan Kabupaten dan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas dan fungsi sekretariat, bidang, dan seksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian:

1. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

Tugas :

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas :

Melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan Fasilitas Pelayanan KB;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

□ Kendala Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan

- profesional dalam berbagai pelaksanaan Tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
 3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
 4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

□ **Tantangan dan Peluang**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat tantangan dan peluang yang berasal dari lingkungan ekseternal dan lingkungan internal yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah yang secara langsung berdampak bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

□ **Analisis Lingkungan Internal**

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program OPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

1. Bonus demografi; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
2. Pengendalian Angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR Nasional mengalami penurunan dari 2,6 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15- 49 tahun (SP 2010), menjadi 2,41 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Sementara TFR Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 mencapai 2,31 dari target 2,14.
2. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) di Provinsi Sulawesi Tengah menurun dari 65,2 persen (SKAP 2018) menjadi 54,4 persen (SKAP 2019). Pada Tahun 2024 mCPR Mencapai 67,72 dari target 61, Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, di antaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan

usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

3. Menurunnya Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan Reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu.
4. Menurunnya Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Sulawesi Tengah dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, unmet need terus mengalami kenaikan yakni pada tahun 2024, posisi unmet need mencapai 9,8 persen dari target 13,98
5. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk tahun 2024 sudah melampaui target, sehingga berpengaruh besar pada pencapaian penurunan Angka Kelahiran.
5. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting adalah masalah serius yang kini tengah di hadapi oleh banyak Negara, termasuk Indonesia Kondisi ini mengacu pada keterlambatan Pertumbuhan Anak akibat Malnutrisi yang berkepanjangan, terutama pada usia Balita. (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan

hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif, berdasarkan Data World Health Organization (WHO) Indonesia menjadi salah satu dari 5 Negara terbesar dengan angka Prevalensi Stunting terbesar di dunia. Sedangkan menurut hasil Survei status Gizi Indonesia (SSGI) Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam 10 Besar Daerah dengan angka Stunting tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, bahwa tahun 2021 angka Prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah berada di angka 29,7 persen .pada tahun 2022 angka Prevalensi stunting menurun menjadi 28,2 persen ,dan pada tahun 2023 turun menjadi 27,2 Persen.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Indikator Kinerja Dinas pengendalian penduduk dan program KB. Namun, perlu penjelasan lebih rinci mengenai indikator keberhasilan yang akan digunakan. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 maka kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, selengkapnya kebutuhan program dan kegiatan dengan target dan pendanaan sebagaimana tabel terlampir:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

TABEL 2.5

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
					Tahun 2025		
					Target	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	12
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						Rp 12.003.087.643	
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55.50	70.00	Rp 10,691,849,973	Provinsi dan 12 Kab
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	2.14.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,75	83.00	Rp 84,420,790	Provinsi dan 12 Kab
			Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah				
	2.14.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di susun	4 dokumen	4 dokumen	Rp 84,420,790	Provinsi
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil	2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Rekomendasi (TLHP)	100%	100%	Rp 7,982,308.613	Provinsi

Pemeriksaan (TLHP)							
	2.14.01.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/ 12 bulan	60 Orang	Rp 7,003,208,613	Provinsi
	2.14.01.1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Laporan	1 Dokumen	Rp 929,700,000	Provinsi
	2.14.01.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	Rp 49,400,000	Provinsi
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	2.14.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	100.00	100.00	Rp 315,273,200	Provinsi
	2.14.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	Rp 220,718,700	Provinsi
	2.14.01.1.05.00010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	50 Orang	Rp 65,724,500	Provinsi
	2.14.01.1.05.00011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	3 Orang	Rp 28,830,000	Provinsi
Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah		100%	Rp 1,017,133,745	Provinsi dan 12 Kab
	2.14.01.1.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	3 paket	Rp 169,897,795	Provinsi
	2.14.01.1.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	3 paket	Rp 195,742,550	Provinsi
	2.14.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Instansi	13 Laporan	Rp 651,493,400	Provinsi dan 12 Kab

Menigkatny a Pemanffata n LayananPe ngadaan Barang dan Jasasecara Elektronik perangkat daerah	2.14.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100	100	Rp 432,018,72 5	Provins i
	2.14.01.1.0 7.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	2 Unit	Rp 22,220,000	Provinsi
	2.14.01.1.0 7.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	17 Unit	Rp 184,483,50 0	Provinsi
	2.14.01.1.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	juMLAH Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan yang di sediakan	0	1 Unit	Rp 225,315,22 5	Provinsi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	2.14.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	100	100	Rp 421,384,90 0	Provins i
	2.14.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	Rp 421,384,90 0	Provinsi
Meningkat nya Kualitas pemelihara an barang milik daerah	2.14.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseSarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100	100	Rp 439,310,00 0	Provins i
	2.14.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	17 unit	17 Unit	Rp 308,150,00 0	Provinsi
	2.14.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	101 Unit	Rp 76,160,000	Provinsi
	2.14.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Pahet	2 Unit	Rp 55,000,000	Provinsi

Terkendali nya Pertumbuh an dan Persebaran Penduduk	2.14.02.1.0 2	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk		1,4	Rp 430,679,950	12 Kab
Meningkat nya Implemnta si Sekolah Siaga Kependudu kan (SSK) di Pendidikan Menengah	2.14.02.1.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Presentase Kab/Kota yang Mengimplementasik an SSK		11.00%	Rp 206,716,650	12 Kab
	2.14.02.1..0 003	Advokasi dan Sosilasisai GDPK	Jumlah Dokumen Revisi GDPK	-	1 Dokumen	Rp 87,527,700	
			Jumlah Kab/Kota yang tersusun Draft GDPK		5 Kab		Kab/Ko ta
	2.14.02.1..0 015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan diKampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Nota Kesepahaman terkait pembagian intervensi Pembentukan pengelolaan Kamupng KB dan Rumah data Kependudukan	-	1 Nota	Rp 53,702,100	Provinsi
	2.14.02.1..0 016	Implementasi Pendidikan kepedudukan Jalur Format ,Non Formal dan informasi pada jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan /SSK dan Pojok Kependudukan /PJK	Jumlah SMA/SMK yang terbimbing dala pengelolaan SSK		20 SMA/SMK	Rp 65,486,850	Provinsi
Meningkat nya Kualitas Pemetaan dan Implement asi Program Bangga Kencana	2.14.02.1.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian	Presentase Implementasi Bangga Kencana		40.00%	Rp 223,963,300	12 Kab
	2.14.02.1.0 2.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Kab/Kota yang menyusun Bangga Kencana		4 Kab/Kota	Rp 171,898,600	12 Kab
	2.14.02.1.0 2.0010	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Profil kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga(Bangga Kencana)		1 Dokumen	Rp 52,064,700	

Menurunnya Angka Kelahiran (TFR)	2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Menurunnya Angka Kelahiran Total Pada Wanita Usia 15-49 Tahun			Rp 290,339,370	12 Kab
Meningkatnya Kesertaan Ber KB di Kab/kota disulweis Tengah	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan Reproduksi			Rp 72,421,150	
Menurunnya Jumlah PUS yang ingin Ber KB tapi tidak terlayani					2 Daerah%		
	2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Sosialisasi Kespro		1 Kab/Kota	Rp 35,745,150	12 Kab
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan StakeHolder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Mitra Kerja yang terjalin Kerja sama di Kab/Kota		5 Mitra kerja	Rp 36,676,000	
Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Presentase PUS yang menggunakan Kontrasepsi Modern			Rp 217,918,220	
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran serta dan Kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Kab/Kota yang mendapat sosialisasi peran serta dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan KB		3 Kab/Kota	Rp 217,918,220	
Meningkatnya Pelaksanaan Dimensi Ketentraman, Kebahagiaan dan Kemandiri	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Kab/Kota yang mengalami peningkatan Nilai Ibangga			Rp 590,218,350	

an Kab/Kota							
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pendampingan Program Ibanga	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Kab/Kota yang mendapatkan Pendampingan			Rp 90,218,550	
	2.14.04.1.01.0009	Penyediaan Kebijakan dalam Rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengasuhan 1000 HPK	-	1 Dokumen	Rp 10,396,000	
	2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadran Keluarga dalam ketertiban Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Kelompok Remaja yang Mengikuti Sosialisasi Smart Parenting		1 Kelompok	Rp 24,103,500	
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi,Pembimbingan ,Pengembangan ,dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kelompok dan kader Tribina ,PLKB, dan Tim Pendamping Keluarga yang mengikuti sosialisasi Program		1 Kelompok	Rp 5,730,000	
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Perwakilan Remaja yang mengikuti Sosialisasi dan pembinaan remaja Generasi Berencana	-	150 Orang	Rp 39,593,050	
	2.14.04.1.01.0022	Advokasi ,Sosialisasi dan promosi indeks pembangunan keluarga (iBANGGA) tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advkasi Ibanga		2 Kab/Kota	Rp 10,396,000	
Menigkatnya Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Kegiatan dalam Pembangunan Kelarga	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Presentase Organisasi Kemsayarakatan dan Kelompok Kegiatan yang meningkat kelompoknya	-	-	Rp 499,999,800	12 Kab
	2.13.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Kelompok Masyarakat dan pengelolaan Tribina yang mendapatkan sosialisas tentang pemberdayaan Ekonomi	-	6 Kelompok	Rp 299,999,900	12 Kab

	2.13.04.1.0 1.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita(BKB) Binna Keluarga Remana (BKR) Bina Keluarga Keluarga Lansia(BKL) usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita(BKB) Binna Keluarga Remana (BKR) Bina Keluarga Keluarga Lansia(BKL) usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	30 Organisasi	Rp 199,999,90 0	12 Kab
--	-----------------------	---	--	---	------------------	-----------------------	--------

BAB III

TUJUAN, SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara

langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk

menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Reformasi Birokrasi Tematik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang mengamanatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu perangkat daerah pengampuh penanggulangan kemiskinan.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Tahun 2020-2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan.
2. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah khusus dan sasaran khusus.
3. Peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi yang kompeten di setiap kabupaten dan kota.
4. penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan Pernikahan Anak, Pencegahan Stunting sejak Dini, dan pembentukan Kampung Keluarga berkualitas Serta peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
5. Memastikan Program Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai Alokasi Anggaran yang memadai sesuai dengan kewenangan Daerah Guna memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana
6. Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Pelayanan Keluarga Berencana dengan memastikan ketersediaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut , Baik dari Pemerintah maupun Swasta.

7. Menjamin tersedianya Alat/obat/Cara Kontrasepsi untuk menunjang Pelayanan Keluarga Berencana pada Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, Baik dari Pemerintah maupun Swasta Fasilitas
8. Meningkatkan Kompetensi sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dapat Melakukan Koordinasi dengan kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maupun Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam melakukan monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Optimalisasi Program.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah adalah **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga”** dengan indikator Tujuan **“Indeks Pembangunan Keluarga”** Adapun Sasaran Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai adalah **” Meningkatkan Ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian Keluarga** dengan indikator **“Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Keluarga”**.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target untuk pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tujuan dan Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025**

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender	Meningkatnya Ketentraman, Kebahagiaan, dan Kemandirian Keluarga	- Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	61.86
			- Indeks Dimensi Ketentraman	Nilai	61.50
			- Indeks Dimensi Kemandirian	Nilai	52.49
			- Indeks Dimensi Kebahagiaan	Nilai	71.60

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2029, bahwa visi pembangunan daerah adalah **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju “** dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat. **Lebih Sejahtera** dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai.

Untuk mencapai visi dan program prioritas diatas maka di Jabarkan ke dalam 9 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu ;

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga.

8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistematis dan Digital.
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Berdasarkan RPJMD dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah menjabarkan arahan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan mendukung misi sebagai berikut:

Tujuan :

1. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas melalui Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi guna mengendalikan angka Kelahiran, Kematian serta Angka Stunting.
2. Mewujudkan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dalam RENSTRA P2KB ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk Serta Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
2. Terlaksananya program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2026, disusun dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mendukung pencapaian Visi, Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatkan Optimalisasi Program Pelayanan Keluarga Berencana Pembangunan yang Berkelanjutan adalah 4 Program, 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp) 2025
1	2	3	4
JUMLAH TOTAL APBD		12.003.087.643	10.503.108.140
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.691.849.973	9.677.156.720
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.420.790	45.299.190
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.420.790	45.299.190
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.982.308.613	7.967.939.454
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.003.208.613	7.003.389.454
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	929.700.000	925.950.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.400.000	38.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	315.273.200	69.555.600
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	220.718.700	49.105.600
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.724.500	20.450.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.830.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.017.133.745	658.369.576
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	169.903.295	129.933.176
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	195.737.050	63.137.150
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	651.493.400	465.299.250
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.508.000	131.508.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.220.000	0
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	184.483.500	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	225.315.225	131.508.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.384.900	421.384.900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	421.384.900	421.384.900
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.310.000	383.100.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.150.000	269.740.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.160.000	60.360.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	55.000.000	53.000.000
2	Program Pengendalian Penduduk	430.679.950	173.821.800
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	206.716.650	90.480.000
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	87.527.700	32.541.300
	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	53.702.100	30.050.450
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Informal pada Jenjang SLTA-MA melalui SSK dan PJK	65.486.850	27.888.300
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	223.963.300	83.341.750
	Penyusunan profil Program kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	52.064.700	63.137.800
	Pemetaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)	171.898.600	20.203.950
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	290.339.720	252.968.320
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	72.421.150	35.050.100
	Pengembangan Strategi Operasional promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi sesuai kearifan budaya lokal	35.745.150	17.745.900
	Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dan pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program Banggan Kencana	36.676.000	17.304.200

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	217.918.220	217.918.220
	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	217.918.220	217.918.220
4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	590.338.450	399.161.300
	Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga	90.218.550	74.015.550
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	487.918.900	0
	Penyediaan Kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuh 1000 hari pertama kelahiran (HPK)	71.245.900	10.396.000
	Pengembangan dan perbanyak materi substansi pusat informasi konseling remaja (PIK R) media promosi, alat permainan edukatif Remaja dan sarana prasarana lainya yang dibutuhkan	32.000.000	0
	Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 (HPK)	5.730.000	5.730.000
	Sosialisasi dan pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	208.189.700	29.583.050
	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana pusat informasi konseling Remaja PIK R	195.513.550	0
	Advokasi Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota	10.396.000	10.396.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	257.700.532	325.145.750
	Sosialisasi dan promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	299.999.900	86.775.450
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	257.700.532	199.999.900

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Pembangunan Keluarga merupakan suatu Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kemajuan Pembangunan Keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Pembangunan keluarga ini di arahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga. Yang mana hal ini berkaitan dengan program penurunan Stunting. Jika di lihat dari hasil survei antara prevalensi stunting dan Angka Pernikahan Anak yang ada di Sulawesi Tengah, maka Dinas Pengendalian Penduduk Sulawesi Tengah berspekulasi bahwa tingginya Stunting di Sulawesi Tengah di pengaruhi oleh Faktor Pernikahan Anak.

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang di tunjukan melalui ketenrtaman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. hasil dari Indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori Tangguh, berkembang atau Rentan.

Membangun Kesadaran tentang Pentingnya Kesehatan Reproduksi adalah Aspek penting dari Kesehatan secara keseluruhan, terutama bagi Remaja yang sedang mengalami fase

perkembangan yang krusial, namun hingga saat ini, masih banyak yang menganggap tabu tentang Kesehatan Reproduksi Remaja meskipun sangat penting bagi perkembangan fisik dan emosional mereka. Kesadaran tentang Kesehatan Reproduksi tidak hanya membantu remaja memahami tubuh mereka, tetapi juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kehidupan seksual mereka.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan Keluarga yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan perangkat daerah terkait dengan lebih optimal dalam menciptakan Good Governance.

Renja-OPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan:

- ❖ Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

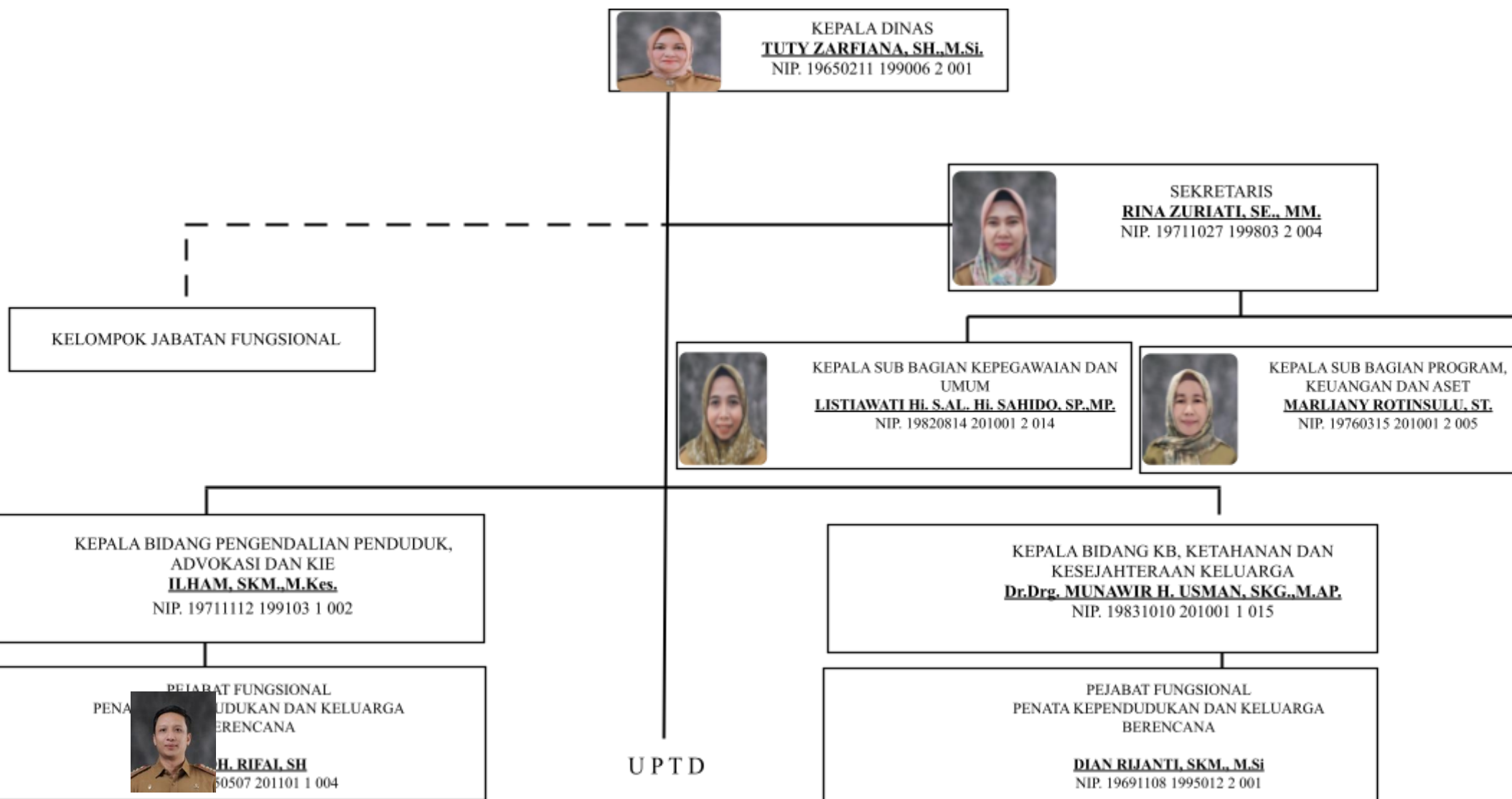
Sulawesi Tengah tahun 2025 organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

**Organisasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025**

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Kepala Bidang	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan
4	Kasubag dan Kasubid	Penanggung Jawab Pelaksana Sub Kegiatan
5	Para JFU/Staf di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	Pelaksana Input dan Operasional Penyelenggara Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kerja



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



5.3 Rencana tindak lanjut.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja-OPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun dengan K/L/D/I maupun OPD yang membidangi fungsi lain. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun sebagai pedoman yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur sebagai pelaksana kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

